

Judul : Revisi UU Pemilu, parpol non parlemen usulkan saksi dibiayai pemerintah
Tanggal : Selasa, 07 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Revisi UU Pemilu

Parpol Non Parlemen Usulkan Saksi Dibiayai Pemerintah

SEKRETARIAT Bersama (Sekber) Gerakan Keadulan Suara Rakyat yang digagas oleh 12 partai politik yang berada di luar Senayan semakin solid untuk mengusulkan ide dan gagasannya.

Adapun 12 partai yang tergabung di Sekber, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai

Geruda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai PRIMA dan Partai Berkarya.

Mereka mengusulkan beberapa isu di dalam Revisi Undang Undang Pemilu. Diantaranya, soal ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*, aturan verifikasi dan terkait dengan saksi di (Tempat Pemungutan Suara (TPS)).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, Sekber akan menggodok berbagai isu terkait dengan pengawasan Revisi Undang Undang Pemilu.

la menuturkan, selain RUU Pemilu, Sekber juga akan mengawal isu-isu yang sangat penting seperti angka *parliamentary threshold*.

Wakil Presiden Partai Buruh, Agus Supriyadi mengakui Sekber ini mempunyai misi untuk memastikan agar saksi partai politik dibiayai oleh Pemerintah. Menurut dia, anggaran untuk membiayai saksi di TPS sangat besar. Bahkan, angkanya bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar direvisi mendatang mewajibkan agar formulir C1

diberikan kepada semua partai politik ada saksi di TPS maupun tidak ada saksi.

Mendengar usulan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi berbagai usulan yang diutarakan oleh parpol di luar Senayan. "Berbagai usulan akan kita kaji secara mendalam," ujar Doli Kurnia.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Ahmad Doli Kurnia dan Agus Supriyadi terkait usulan agar saksi di TPS dibiayai oleh Pemerintah.

AGUS SUPRIYADI

Wakil Presiden Partai Buruh

Satu Partai Minimal Harus Siapkan 160 M



99 Kalau misalnya kita membayar honor saksi 200 ribu per orang dikali 800 ribu TPS, maka partai politik harus mengeluarkan dana 160 miliar rupiah. Itu untuk satu partai saja.

INFONYA. Sekber Parpol non parlemen juga mengusulkan agar di RUU Pemilu memasukkan terkait saksi di TPS. Bisa Anda jelaskan?

Begitu. Sebenarnya di Sekber parpol non parlemen itu ada tiga isu utama yang diperjuangkan. Yang pertama, soal angka ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*. Kedua, mengenai verifikasi dan terkait saksi di TPS. Kita memperjuangkan agar saksi bisa dibiayai oleh Pemerintah.

Kenapa begitu?

Supaya adil. Sebab, banyak parpol yang tidak bisa menyiapkan saksi di TPS. Di Indonesia, pada pemilu kemarin jumlah seluruh TPS kurang lebih 800 ribu TPS.

Kalau misalnya kita membayar honor saksi 200 ribu per orang dikali 800 ribu TPS, maka partai politik

harus mengeluarkan dana 160 miliar rupiah. Itu untuk satu partai saja.

Anggaran itu buat saksi doang?

Iya buat saksi doang. Makanya kita berpikir supaya adil bagi seluruh partai pemilu saksi ditanggung oleh Pemerintah. Atau seluruh partai politik dikasih semua form C1 nya dari TPS-TPS seluruh Indonesia. Jadi kita tahu hasilnya.

Maksud Anda, ada saksi yang mau pun tidak ada saksi dari parpol tetap form C1 diberikan?

Betul. Ada saksi atau tidak, ada saksi C1 plano harus diberikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu.

Apa manfaatnya?

Kalaupun terjadi kecurangan bisa tahu pada saat itu juga. Sekaligus

meminimalisir potensi kecurangan di tingkat PPK sampai atas.

Kalau pemilu lalu kan partai yang tidak mempunyai saksi di TPS, maka tidak bisa mendapatkan form C1 atau plano. Jika kita mendapatkan C1, maka potensi kecurangan hanya di level TPS.

Di Pemilu 2024, kita kesulitan untuk mengamankan suara di TPS karena tidak mempunyai saksi dan tidak mendapatkan formulir C1 Plano nya.

Kalau dari awal kita mendapatkan form C1 di TPS, dalam hitungan jam kita bisa melihat apakah mendapatkan kursi atau tidak.

Apa yang akan dilakukan Sekber parpol non parlemen agar usulan tersebut diakomodir?

Itu lah tujuan dari dibentuknya Sekber. Untuk pertama, kami tetap koordinasi dengan DPR. ■ **REN**

AHMAD DOLI KURNIA

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR

Yang Perlu Dikaji, Anggarannya Ada?



99 Sebetulnya, gagasan tentang pembiayaan saksi bagi partai politik itu pernah dibicarakan sebelum pemilu yang kemarin. Dan usulan itu bagus-bagus aja.

ADA usulan dari Sekber parpol non parlemen agar saksi dibiayai oleh Pemerintah. Apa tanggapan Anda?

Yang pertama, saya memberikan apresiasi terhadap berbagai usulan dari Sekber parpol non-parlemen yang sudah mulai bicara soal penyempurnaan sistem pemilu.

Berbagai usulan yang ada harus dilakukan kajian yang cukup mendalam termasuk usulan-usulan dari Sekber.

Soal dana saksi. Bagaimana?

Sebetulnya, gagasan tentang pembiayaan saksi bagi partai politik itu pernah dibicarakan sebelum pemilu yang kemarin. Dan saya termasuk tidak memperlmasalah dengan usulan tersebut. Dan usulan itu bagus-bagus aja.

Dan bisa saja didorong di dalam revisi UU Parpol, negara harus punya tanggungjawab terhadap keberadaan parpol di Indonesia. Nah, salah satunya tanggungjawab pembiayaan parpol termasuk elemen tentang biaya saksi.

Bagaimana dengan usulan agar semua parpol wajib mendapatkan C1?

Soal C1 di TPS, selama ini juga semuanya bisa diakses. Dan setiap partai politik peserta pemilu yang ikut pemilu bisa mendapatkan C1. Semua partai politik yang punya saksi secara otomatis mendapatkan C1.

Kalau partai yang nggak punya saksi, bagaimana?

Ya, terus mau kasihnya gimana? Ngasihnya ke siapa? Apakah dian-

tar ke setiap masing-masing partai politik. Apakah KPU ngirim-ngirim. Ngirim kemana?

Kalau dikirim ke kantor partai politik di level mana? Apakah level desa, kabupaten atau dikirim ke pusat. Secara teknis menyulitkan.

Kalaupun membutuhkan tenaga untuk mengantarkan berkas ke partai politik, berarti butuh penyelenggara dan anggaran lagi.

Tapi, pada prinsipnya Anda tidak memperlmasalah dana saksi dibiayai oleh negara?

Apakah saksi itu dibiayai negara atau tidak, saya kira perlu kajian mendalam. Yang patut dikaji adalah terkait ketersediaan anggaran dari Negara. Apakah anggaran ada atau tidak. ■ **REN**